

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pendidikan dalam kehidupan manusia sepanjang masa merupakan keniscayaan yang tak bisa diabaikan. Manusia akan selalu membutuhkan dan memposisikan pendidikan sebagai penempa diri untuk mengarungi kehidupan dalam menggapai kesejahteraan dunia-akhirat. Peranan penting pendidikan bagi manusia ini tak lain karena menjadi media transformasi dan aktualisasi nilai pada diri manusia yang kemudian menjadi ruh dalam budaya dan peradaban yang melingkupinya.

Dengan adanya pendidikan yang berkualitas akan mampu menghasilkan serta menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kompetitif dan komparatif dalam bermasyarakat dan bernegara. Sumber daya manusia yang tinggi akan mampu merespon dan mewarnai sistem perubahan sosial yang kompleks dan serba cepat. Dengan kata lain sangat dimungkinkan bahwa dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi seseorang akan mampu menciptakan peluang dan berperan aktif dalam setiap perubahan yang terjadi. Akan tetapi sebenarnya pendidikan bukan hanya berfungsi sebagai media pembentuk kompetensi kompetitif dan komparatif yang tinggi pada diri manusia namun juga dari segi sistem sosial diharapkan berperan aktif dalam memprediksi, mengarahkan serta menciptakan berbagai lini perubahan sosial yang tidak mungkin dihindari oleh manusia, sebagai subyek perubahan itu sendiri.¹

Adapun mengenai rumusan, konsep dan tujuan pendidikan secara jelas telah diatur dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) nomor 20 Tahun 2003. Terdapat beberapa jenis jalur pendidikan di Indonesia yaitu jalur pendidikan formal, non formal, dan

¹ Zainuddin Maliki, *Sosiologi Pendidikan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), 272-273.

informal. Secara fungsi dan peran pada dasarnya semua jenis maupun jalur pada pendidikan di Indonesia saling melengkapi dan mengisi. Sebagai contoh pondok pesantren melengkapi pendidikan keagamaan bagi anak didik pada jalur formal.

Lembaga pendidikan kursus (LPK) juga melengkapi keterampilan dan kecakapan yang mendukung sesuai dengan tuntutan kebutuhan kerja. Begitu juga lembaga pendidikan yang lain seperti pendidikan paket atau wajar dikdas yang mampu menjembatani bagi masyarakat yang ingin memiliki kesetaraan ijazah dengan sekolah formal. Keseluruhan jenis pendidikan tersebut tentu perlu adanya aturan yang baku mengenai tujuan, pembelajaran atau pelatihan, visi dan misi yang jelas dan profil lulusan yang diharapkan. Dengan istilah yang sederhana semua itu disebut dengan kurikulum. Sehingga kurikulum menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dalam pendidikan. Begitu vitalnya kurikulum maka dapat disebut sebagai ruh dan koridor pada lembaga pendidikan.

Sebagai sarana mencapai tujuan dalam pendidikan dan mewujudkan profil lulusan yang dicita-citakan sesuai dengan visi dan misi, maka menyusun kurikulum yang sistematis dan responsif serta relevan dengan perkembangan zaman lazim dan mutlak dilakukan. Dalam penyusunan kurikulum tersebut harus diperhatikan juga perkembangan aspek psikologis peserta didik. Selain itu juga kurikulum hendaknya mampu mengarahkan kepada progresifitas pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta seni dan budaya bangsa. Oleh karena itu secara periodik kurikulum nasional selalu dikaji ulang, dievaluasi dan dikembangkan agar mampu menjawab tantangan kebutuhan zaman yang dinamis dalam berbagai tingkatan lokal, nasional dan internasional.

Atas dasar prinsip dan pertimbangan tersebut kurikulum didesain sedemikian rupa agar mampu mewujudkan, membekali serta menyiapkan peserta didik yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Di dalam Undang-undang sisdiknas telah memberikan standar

kualifikasi yang jelas tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik yang tidak hanya menguasai pengetahuan namun juga memiliki sikap dan keterampilan.

Perubahan kurikulum selalu memunculkan persoalan dalam dunia pendidikan. Persoalan yang paling rentan muncul adalah dari faktor internal yaitu penguatan pada sumber daya manusia bidang pendidikan dan mengubah pola pikir (*mindset*) praktisi pendidikan. Ketidakefahaman antara pemangku kebijakan dengan pelaksana kebijakan sering menjadi sumber ketimpangan dalam implementasi. Adapun persoalan yang dari luar adalah bagaimana pendidikan mampu menampilkan profil lulusan dengan kompetensi kebutuhan masa depan.

Dalam paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengemukakan bahwa terdapat empat isu pokok yang harus diperhatikan dan dikembangkan dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan diantaranya adalah akses pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan, kurikulum, pelestarian dan pengembangan kebudayaan, dan tata kelola pendidikan.² Persoalan-persoalan baik internal maupun eksternal harus dihadapi dengan menentukan arah kebijakan pendidikan yang lebih komprehensif.

Setiap perubahan dan pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan terjadinya keadaan yang berbanding lurus mutu lulusan pendidikan. Dari episode satu ke episode berikutnya kurikulum mengembangkan proses pembelajaran, materi, kompetensi guru dan kualitas skill lulusan. Mulai dari belajar yang berpusat pada guru (*Teacher Centred*) sampai kepada pembelajaran yang berpusat pada siswa (*Student Centred*) selalu menjadi isu utama dalam kurikulum. Bahkan dengan model pembelajaran yang dilaksanakan tersebut menjadi nama kurikulum di Indonesia. Misalnya kurikulum 1994 yaitu CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif), kurikulum berbasis

² Menteri Pendidikan, *Press Workshop Implementasi Kurikulum 2013*, Pondok Cabe, 14 Januari 2014.

Kompetensi (KBK) tahun 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006.

Pengembangan kurikulum berkelanjutan menjadi hal mutlak dilakukan oleh pemerintah. Perubahan globalisasi yang berkelanjutan dan tidak mungkin untuk dihindari hampir di semua bidang seperti, semakin berkurangnya sumber daya alam, tantangan politik, ekonomi sosial dan budaya. Perubahan dan tantangan tersebut hanya mampu diatasi dengan kesadaran untuk melakukan pembangunan di segala bidang secara berkelanjutan pula, termasuk juga mengembangkan kurikulum pendidikan yang berkelanjutan.

Memperhatikan semua tantangan yang muncul ini juga menjadi dasar dunia pendidikan kelas dunia UNESCO mengembangkan sistem kurikulum pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (*Curriculum Framework for Education for Sustainable Development*). Sistem kurikulum UNESCO dimaksudkan untuk mendukung pencapaian terwujudnya kompetensi masing-masing sebanyak mungkin pelajaran dan untuk mewujudkan keberlanjutan di sekolah, tidak hanya pelajaran namun juga administrasi dan manajemen sekolah. Anak-anak atau generasi muda perlu selalu mengembangkan kompetensi yang berkelanjutan untuk kehidupan dan lingkungan mereka sendiri dan sebagai bekal masa depan mereka baik sosial maupun profesional. Sistem pendidikan seyogyanya memberikan kesempatan bekal kualifikasi tersebut karena globalisasi ekonomi dan hampir semua sektor³

Searah dengan kurikulum pendidikan berkelanjutan tersebut untuk menghadapi era globalisasi yang semakin nyata perlu kiranya mereorientasikan arah pembangunan pendidikan nasional. Ada beberapa hal yang menjadi fokus pembangunan pendidikan di antaranya yaitu;

1. Meningkatkan pemerataan akses serta kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat luas,

³ Jorg-Robert Schreiber dan Hannes Siege, Eds, *Curriculum Framework: Education for Sustainable Development* (Bonn: Engagement Global gGmbH, 2016), 23-25.

2. Pengembangan wawasan kompetitif (berdaya saing) dan komparatif (unggul). Hal ini karena arus perubahan dunia atau globalisasi semakin deras sehingga menuntut adanya evaluasi dan refleksi tentang keunggulan apa yang kita miliki diantara negara-negara lainnya.
3. Adanya keterkaitan pendidikan yang searah dengan kebutuhan pembangunan nasional. Keterkaitan tersebut bisa berupa terciptanya SDM unggul profesional, memiliki karakter kebangsaan yang kuat sesuai dengan jumlah kebutuhan.
4. Menciptakan masyarakat dan generasi yang selalu belajar secara terus menerus. Dengan belajar terus menerus masyarakat Indonesia tidak tertinggal dari segi IPTEK dan seni.
5. Pendidikan selalu berorientasi pada penyiapan generasi sekarang sekaligus generasi masa yang akan datang. Dengan demikian mengharuskan adanya studi penelitian yang mampu memprediksi apa yang akan terjadi dan dibuthkan di masa mendatang. Sehingga generasi-generasi pendidikan selalu *uptodate dan relevan* dengan zaman
6. Pendidikan dimaksudkan untuk memperkuat jati diri atau identitas bangsa. Dalam globalisasi indonesia tetap mampu menampilkan kepribadian bangsa berlandaskan pancasila, Undang-undang Dasar dan negara dalam kemajemukan.⁴

Pada tahun 2013 pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan telah mengembangkan kurikulum sebelumnya dengan kurikulum baru yaitu kurikulum 2013 pada semua jenjang pendidikan. Pada kurikulum 2013 menitik beratkan pada aktifitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Para peserta didik dilatih agar secara aktif mencari informasi tentang materi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri yang muncul dalam proses tahap kegiatan mengamati dalam

⁴ E Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 16-17.

pembelajaran. Pada intinya kurikulum 2013 ini bermaksud membiasakan sikap kritis dan berfikir logis pada semua peserta didik dalam kehidupan nyata.

Adapun di antara 8 standar pendidikan nasional yang mengalami perubahan dan pengembangan dalam kurikulum ini adalah pada standar kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi, Standar Proses dan standar penilaian. Dalam kurikulum yang baru ini sangat proporsional kompetensi lulusan yang dikembangkan yaitu mencakup ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan serta pendidikan karakter.

Perubahan Kurikulum 2006 menjadi Kurikulum 2013 memunculkan berbagai reaksi dan pendapat dari berbagai pihak. Pihak yang kurang sependapat dengan perubahan kurikulum menganggap perubahan kurikulum tersebut sebagai hal yang terlalu tergesa-gesa. Pendapat ini berasumsi bahwa sebelum perubahan harus terlebih dahulu adanya evaluasi yang mendalam terhadap kurikulum sebelumnya sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun serta menerapkan kurikulum yang baru.

Asumsi atau pendapat ini berdasarkan fakta yang ada bahwa masih banyak sekolah dan guru serta tenaga kependidikan lainnya belum secara penuh menerapkan KTSP 2006. Keadaan tersebut akan semakin runyam jika dalam kondisi yang belum stabil implementasi kurikulum lama namun harus menerapkan kurikulum baru dengan karakteristik dan sistem yang berbeda. Prinsip utama yang ada pada kurikulum 2013 ini adalah berusaha mengintegrasikan materi antar mata pelajaran dengan satu model pembelajaran saintifik. Sebaliknya bagi pihak yang sependapat dengan perubahan kurikulum, menganggapnya memang sudah seharusnya dilakukan dengan dasar berbagai pertimbangan pula. Namun yang tak kalah penting dari semua perubahan kebijakan termasuk kurikulum adalah sosialisasi yang matang dan melibatkan berbagai pihak terkait terutama guru sebagai pelaksana kurikulum di dalam kelas.

Berbagai pendapat dan tanggapan dalam menyikapi rencana perubahan kurikulum seringkali dikaitkan dengan persoalan kompetensi guru sebagai pelaksana kurikulum di kelas. Selain guru secara khusus juga asumsi tentang siap dan tidaknya sekolah dalam menerima pemberlakuan kurikulum baru juga menjadi hal yang *intens* diperbincangkan. Sistem manajemen sekolah dengan didukung sumber daya manusia yang ada dalam manajemen tersebut haruslah dipertimbangkan dan dibenahi terlebih dahulu sebelum suatu kebijakan itu diterapkan, tak terkecuali kebijakan kurikulum. Sehingga diharapkan tidak terjadi ketimpangan maupun kesenjangan antara tujuan dan realita.

Ketimpangan penerapan di sekolah selalu menjadi permasalahan rutin dalam setiap kali terjadi perubahan kurikulum. Hal ini hampir karena sekolah dan semua tenaga kependidikan belum siap dalam berbagai hal yang menjadi prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan baru dalam hal ini kurikulum. Di antara indikator dari kesiapan menerapkan atau melaksanakan kurikulum tersebut meliputi; tersedianya perangkat kurikulum (buku babon) yang baku sehingga menjadi panduan utama dalam prosedur dan pelaksanaan kurikulum, tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitas sekolah yang mendukung proses pelaksanaan kurikulum dalam proses pembelajaran dan kegiatan pendidikan lainnya, tersedianya anggaran yang cukup dari segi efektifitas dan efisiensi yang dialokasikan untuk pendidikan, serta tersedianya SDM yang mumpuni baik pendidik maupun tenaga kependidikan lainnya.⁵ Begitu juga tentu dalam implementasi kurikulum yang baru mutlak membutuhkan kesiapan yang matang dari semua pihak. Kesiapan tersebut dapat dibangun melalui pintu gerbang sosialisasi, pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan dan sarana prasarana serta pelatihan secara kontinu.

⁵ Amin Yusuf, Kesiapan Sekolah Mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), *Lembaran Ilmu Kependidikan Jilid 36*, (2), (2007). 85-95.

Di awal akan diterapkannya kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mencanangkan beberapa syarat yang disinyalir menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasinya di sekolah-sekolah. Faktor tersebut adalah

1. Ketersediaan SDM baik guru maupun tenaga kependidikan lainnya dengan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya sehingga memenuhi kapasitas kurikulum yang baru dan hahan ajar.
2. Tersedianya bahan ajar yang memadai berupa buku ajar dan sumber belajar lainnya yang saling terintegrasi sesuai dengan standar pembentuk kurikulum. Ketersediaan buku sebagai bahan ajar dan sumber belajar yang mengintegrasikan standar pembentuk kurikulum;
3. Pemerintah pusat, provinsi dan kota harus berperan aktif dalam membina dan mengawasi implementasi. Dengan kata lain adanya pendampingan yang berkesinambungan dari pemerintah,
4. Penguatan manajemen dan budaya sekolah. Sekolah akan sulit mengimplementasikan sebuah kebijakan jika tidak didukung dengan sistem manajemen yang solid dan sistematis.⁶

Memperhatikan beberapa faktor di atas dapat diketahui bahwa pertama kali yang mendapat perhatian dalam implementasi adalah guru dan tenaga kependidikan. Hal ini memang sudah semestinya dilakukan karena bagaimanapun juga guru dan tenaga kependidikan lainnya menjadi pelaku utama dalam kurikulum. Oleh karena itu guru harus memiliki kompetensi yang harus dikembangkan dan ditingkatkan baik secara pedagogik, akademik, sosial, personalitasnya dan kompetensi manjerialnya. Dengan kompetensi guru yang baik akan sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang baru. Sebagai garda terdepan dalam implementasi setiap kurikulum selalu menuntut kesigapan dan kesediaan

⁶<https://ildikti12.ristekdikti.go.id/2012/12/27/keberhasilan-kurikulum-2013.html> diakses pada tanggal 6 Desember 2019.

guru untuk memiliki sikap terbuka (*open minded*) dan mengubah pola pikir (*mindset*) terhadap perubahan sistem kurikulum baru. Dengan demikian pola lama dalam pembelajaranpun akan dapat tergeser dengan metode dan pendekatan pembelajaran saintifik yang bertujuan mendorong peserta didik aktif mencari tahu informasi melalui tahapan-tahapan ilmiah. Sehingga benar-benar memperoleh pengetahuan dan pengalaman belajar yang kuat.⁷

Adapun kurikulum nasional harus sesuai dengan standar nasional pendidikan yang telah disusun berdasarkan jenjang pendidikan masing-masing untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Penyusunan dan pengembangan kurikulum tersebut tetap harus memperhatikan prinsip diversifikasi sesuai dengan potensi daerah dan peserta didik. berikut beberapa garis besar dalam penyusunan kurikulum nasional;

1. Peningkatan keimanan dan ketakwaan
2. Peningkatan akhlak mulia
3. Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik
4. Memperhatikan keragaman potensi daerah dan lingkungan (kearifan lokal)
5. Memperhatikan tuntutan pembangunan daerah dan nasional
6. Memperhatikan kebutuhan dunia kerja
7. Memperhatikan perkembangan IPTEK dan seni
8. Memperhatikan Agama
9. Memperhatikan dinamika perkembangan global, dan
10. Memperkuat persatuan dan nilai-nilai kebangsaan.⁸

Pendidikan pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang paling tua di Indonesia. Keberadaan pondok pesantren dan segala dinamika

⁷ <https://ltdikti12.ristekdikti.go.id/2012/12/27/keberhasilan-kurikulum-2013.html> diakses pada tanggal 6 Desember 2019.

⁸ Undang-Undang, “20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,” (8 Juli 2003)..

pesantren tidak pernah usang untuk digali dalam studi. Pondok pesantren memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang khas atau keunikan tersendiri sehingga sulit ditemukan di lembaga pendidikan lainnya. Salah satu keunikan dan keorisinilan pesantren adalah terlahir di Indonesia dan menjunjung tinggi budaya ke Indonesiaan. Bentuk pendidikan yang murni hasil prakarsa pribumi ini sudah familiar dan disegani sejak masa kolonial sampai sekarang pun masih tetap menarik perhatian masyarakat Indonesia khususnya maupun dunia luar.

Eksistensi pesantren cenderung disebabkan mereka tetap teguh dalam menjalankan visi dan misi pesantren sehingga meskipun di era modernisasi, globalisasi kemajuan teknologi dan lain sebagainya tetap mampu menampilkan jati diri pesantren. Dengan didukung kurikulum yang jelas dan matang, pesantren beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga terdapat istilah pondok pesantren salaf dan modern. Namun keduanya tetap menjaga akar budaya tradisi di pesantren.⁹

Budaya pesantren dan tradisinya secara otomatis telah menjadi sistem pendidikan Islam yang lahir dan berkembang sejak awal Islam masuk di Indonesia selalu menjadi obyek penelitian yang menarik oleh para akademisi dan ilmuwan yang ingin menggali khazanah ke-Islaman di Indonesia ini. Akan tetapi kebanyakan deskripsi oleh para peneliti tersebut masih sebatas gambaran yang bersifat materi bangunan dan aspek kesederhanaan pesantren, belum menyentuh aspek-aspek yang mendalam dan lebih detil dari pesantren. Para peneliti hanya sekedar memberikan gambaran yang kurang obyektif sesuai dengan kepentingannya dan latar belakang pendidikannya. Peran kunci pesantren yaitu penyebaran agama Islam dan pemantapan ketaatan masyarakat terhadap ajaran Islam.¹⁰

⁹ Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 187.

¹⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Cetakan Ke-9 (Jakarta: LP3ES, 2015), 38-40.

Di Indonesia ada banyak berdiri pesantren sejak zaman dulu. Adapun dasar ataupun payung hukum dari berdirinya pesantren di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah (PP) No 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Dalam bab I peraturan tersebut menyebutkan secara eksplisit bahwa pesantren adalah sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat baik sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai wadah penyelenggara pendidikan. Pesantren salafiyah adalah pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan kitab kuning dan sistem pengajaran yang ditetapkan oleh kyai atau pengasuh.¹¹ Dengan demikian pesantren secara resmi diakui dan dilindungi oleh pemerintah dan memiliki sistem pengajaran yang khas dengan menggunakan kitab kuning/salaf.

Keberadaan sistem pendidikan pondok pesantren dan pendidikan sekolah, selama ini sering menjadi sebab munculnya dikotomi dan diskriminasi di antara pendidikan pondok pesantren dan pendidikan umum (sekolah). Secara fenomenologi pesantren dan sekolah masing-masing memiliki keunggulan sistem dan bentuk idealisme yang berbeda. Sehingga rentan terjadinya gap yang mempengaruhi pendidikan.¹²

Pesantren berperan sebagai lembaga pendidikan Islam yang secara khusus mempersiapkan generasi penerus yang ahli dalam bidang agama, keagamaan dan kecakapan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Para santri yang kelak meneruskan perjuangan para ulama/kyai. Peraturan Menteri Agama (Permenag) nomor 13 telah merumuskan bahwa pondok pesantren adalah sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt. Pada diri semua anak didik

¹¹ Peraturan Pemerintah, “55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan,”
(5 Oktober 2007).

¹² Ian Craib, *Teori-Teori Sosial Modern*, Terjemahan Paul S. Baut & T. Effendi (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 127.

2. Mengembangkan kemampuan dalam pengetahuan, sikap dan keterampilan anak didik tentang agama sehingga menjadi orang yang memahami ilmu-ilmu agama Islam (*Mutafaqqih fi al dīn*)
3. Menciptakan generasi yang memiliki kepribadian yang matang, *akhlaq al karīmah*, sehingga menjadi individu yang utuh mampu menunjukkan sikap kesolihan secara individual maupun sosial. Pribadi yang memiliki tinggi jiwa yang ikhlas, sederhana, mandiri, menjaga *ukhuwwah al Islamiyyah, tawaḍu', tasamuh, tawāzun, tawasut, al uswah al ḥasanah*, sehat jasmani dan rohani serta sikap cinta tanah air (*hubbul Waṭan*).¹³

Di awal permulaan berdirinya pesantren, banyak yang mengabaikan legalitas ijazah. Dengan kata lain belajar di pesantren tidak bertujuan ingin memiliki ijazah tapi hanya semata mendalami ilmu agama, mengharapkan berkah kyai dan kemanfaatan ilmu. Akan tetapi legalitas pengakuan keilmuan juga sangat perlu untuk diperhatikan. Tidak menutup kemungkinan kebanyakan alumni pesantren juga berperan aktif dan berkiprah dalam berbagai bidang pekerjaan dan sektor kegiatan lainnya yang tentu membutuhkan adanya ijazah sebagai bukti legalitas secara akademis. Sehingga pada banyak terobosan yang dilakukan oleh para alumni yang mampu membuktikan diri dan bersaing dengan lulusan yang bukan pondok pesantren. Dengan program kesetaraan (pesantren *mu'adalah*) pesantren dapat mengelola kurikulum umum sesuai dengan jenjang. Pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan diniyyah formal. Akan tetapi tidak semua pesantren berstatus *mu'adalah*. Pada akhirnya banyak alumni pesantren yang semakin berprestasi dalam pendidikan tinggi dengan melalui matrikulasi.¹⁴

Pendidikan pesantren berhasil mencetak para santri menjadi ulama-ulama yang memiliki kefahaman agama dan

¹³ Peraturan Menteri Agama, “13 Tahun 2014, tentang Pendidikan Keagamaan Islam,” (18 Juni 2014).

¹⁴ Asrori S. Karni, *Etos Studi Kaum Santri: Wajah Baru Pendidikan Islam* (Bandung: PT Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2009), 175–193.

karakter yang tinggi ini tidak terlepas dari faktor kapasitas sang pengasuh/kyai. Dengan menggunakan metode pendidikan berupa pembimbingan dan perhatian penuh kyai menekankan aspek kualitatif keilmuan menjadikan lulusan semakin berkualitas.

Dalam pendidikan pesantren secara umum bertujuan untuk memperkaya khazanah keislaman seiring dengan peningkatan akhlaq, luhur budi, menanamkan dan memupuk nilai spiritual, kemanusiaan, semangat dalam kebaikan, sehingga menjadi pribadi yang selalu dapat menjunjung tinggi etika agama. Bukan hanya sekedar memperbanyak pengetahuan saja namun juga sikap dan keterampilan juga menjadi arah capaian pendidikan pesantren. Dengan demikian para santri nantinya mampu mandiri dalam menjalani berbagai aspek kehidupan dan tidak selalu bergantung pada orang lain. Hanya Allah Swt satu-satunya Zat untuk menyandarkan diri atas segala urusan. Itulah cita-cita utama dalam pendidikan pesantren.. Dalam hal ini para kyai sangat memahami karakteristik dan kemampuan para santri kemudian mendidik mereka sesuai dengan karakteristik, kemampuan dan segala keterbatasannya masing-masing.¹⁵

Lembaga pendidikan pondok pesantren dan pendidikan umum/sekolah masing-masing memiliki keunggulan dan sistem tatanan sosial. Keunggulan tersebut akan beridiri pada posisinya dan pradigmanya dalam pendidikan yang pada akhirnya membuka dikotomi dan diskriminasi ilmu semakin lebar. Padahal secara rasional tentu akan semakin kuat keunggulan masing-masing lembaga saling berintegrasi dan bersinergi dalam memperbaiki sistem pendidikan yang nasional. SMP Berbasis Pesantren bisa menjadi solusi menjembatani kesenjangan tersebut.

Dengan berupaya mengintegrasikan keunggulan sistem pendidikan umum/sekolah formal dengan

¹⁵ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*,... 45.

keunggulan pesantren dalam pendidikan karakter dan kedalaman muatan keagamaannya dapat menjadi salah satu langkah dalam memperbaiki kualitas peserta didik. Dengan langkah kongkrit ini diharapkan kultur pesantren yang secara keseluruhan menjadi karakter kuat bagi para santri dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan umum/sekolah dengan tata kelola yang lebih sistematis. Sehingga output pesantren memiliki kompetensi umum dan sebaliknya sekolah umum mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter dan pengetahuan agama yang luas.

SMP Pesantren (SMP Berbasis Pesantren) adalah konsekuensi logis dari fakta sosial, kesadaran manusia dalam berfikir, berinovasi dan selalu berkembang seiring perkembangan zaman. Memperhatikan fenomena pendidikan umum dengan tingkat moralitas semakin memprihatinkan, tawuran antar pelajar, narkoba dan deviasi sosial yang lain mengundang perhatian dan pemikiran serius antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama Bidang Pendidikan Pondok Pesantren dan Diniyyah serta Pusat Pengembangan Pendidikan (*Centre for Educational Development/CERDEV*) UIN Jakarta, pondok pesantren dan sekolah untuk membuat terobosan model pendidikan Islam dengan label SMP Berbasis Pesantren dengan maksud dapat mengatasi fenomena tersebut.¹⁶

Dengan keunggulan masing-masing lembaga pendidikan sekolah dan pesantren diharapkan dapat bersinergi untuk saling mengisi, melengkapi dan memperbaiki serta memajukan pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2012 terdapat 4 SMP Berbasis Pesantren di Jepara, dan pada tahun 2013 tambah satu lagi SMP yang mendapatkan program SMP Berbasis Pesantren.

Program tersebut menurut Dirjend Pendidikan Dasar dan Menengah pada workshop penerimaan Bantuan pembinaan dan keterampilan SMP Berbasis Pesantren di

¹⁶ Nurrochim, Sekolah Berbasis Pesantren Sebagai Salah Satu Model Pendidikan Islam dalam Konsepsi Perubahan Sosial, *Jurnal Al Tahrir*, Vol.16, (1), Mei 2016, 72-73.

Yogyakarta pada tahun 2015 menjelaskan bahwa program SMP Berbasis Pesantren adalah hasil kerjasama dan kesepakatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Agama Bidang Pendidikan Diniyyah dan Pondok Pesantren. Kedua kementerian tersebut sama-sama melihat segi keunggulan yang ada pada masing-masing pendidikan Umum dan Pesantren untuk diintegrasikan dalam model pendidikan SMP Berbasis Pesantren. Program ini berlanjut berdasarkan MOU (*Memorandum of Understanding*) dua kementerian tersebut selama 5 tahun. Bagi SMP Berbasis pesantren yang sudah menerima Bantuan Pembinaan selama 5 tahun maka akan dilepas karena sudah dianggap mampu untuk berkembang secara mandiri. Akan tetapi bukan berarti lepas bebas dari kontrol dan pengawasan kemendikbud dan kemenag.¹⁷ Dalam pidato sambutannya juga diertkur mengemukakan harapan yang melandasi program SMP Berbasis Pesantren yaitu terciptanya generasi yang unggul dalam sains dan keagamaan serta memiliki *akhlaqul karīmah*.

Menurut pengamatan penulis secara kemampuan dan pemahaman materi Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Berbasis Pesantren Jepara sudah memadai. Hal ini berdasarkan dari latar belakang pendidikan mereka berasal dari pesantren yang sarat dengan kajian ilmu-ilmu agama. Akan tetapi terdapat kesenjangan antara idealisme dengan kenyataan bahwa hasil capaian prestasi peserta didik SMP Berbasis Pesantren rata-rata belum maksimal dilihat dari keunggulan pesantren.

Secara logis, jika dibandingkan peserta didik SMP Berbasis Pesantren (santri) dengan peserta didik SMP umum tentu diharapkan mampu memiliki keunggulan pemahaman dan prestasi akademik maupun non akademik dalam Pendidikan Agama Islam yang lebih karena pesantren lebih banyak referensi ilmu-ilmu agamanya.

¹⁷ Didik Suhardi, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Pidato Pembukaan workshop Penerimaan Bantuan Pembinaan dan Bantuan Keterampilan SMP Berbasis Pesantren Tahun 2015.

Ternyata hasilnya masih standar dalam pencapaian nilai USBN PAI.

Menurut Hadi M. Yunus Kepala SMP Takhasus Qur'an Saddamiyyah Bangsri Jepara yang juga termasuk SMP Berbasis Pesantren bahwa guru PAI di SMP tersebut sudah linear. Akan tetapi secara pedagogik ketika ditanya apakah sudah memenuhi sesuai dengan amanat Undang-undang apa belum beliau mengatakan kurang begitu memahami. Kemudian ketika ditanya dengan kesiapan guru PAI dalam implementasi kurikulum 2013, juga antara siap dan kurang siap.¹⁸ Begitupun tak jauh beda dari SMP Berbasis Pesantren lainnya yang ada di Jepara.

Senada dengan pernyataan kepala SMP TAQ Saddamiyyah Bangsri, Mulyono mantan Kepala SMP Walisongo Pecangaan yang juga sebagai guru PAI di sekolahnya juga mengemukakan bahwa secara penguasaan materi sudah dikatakan matang, namun dalam metode dan teknik penyampaian masih perlu adanya peningkatan dan pengembangan yang kontinu. Lebih lanjut beliau menjelaskan memang belum pernah ada peserta didik yang mampu mencapai nilai sempurna dalam USBN PAI. Nilai tertinggi yang pernah dicapai selama beliau mengajar adalah kisaran 90.¹⁹

SMP Berbasis pesantren tentu bukan merupakan hal asing untuk pendidikan Agama Islam, karena mainstream pesantren adalah utamanya pada *Tafaqquh Fi al Dīn*, pendalaman ilmu-ilmu agama. Uniknyanya dan menarik untuk diteliti adalah bahwa SMP Berbasis Pesantren adalah seyogyanya mampu menghasilkan peserta didik yang betul-betul faham ilmu agama atau keagamaan maupun prestasi keagamaan. Namun pada kenyatannya belum ada dari mereka yang ada di Jepara mampu meraih nilai sempurna dalam USBN PAI. Kemudian juga dalam linieritas ijazah yang dimiliki guru juga tidak menjamin guru tersebut

¹⁸ M. Hadi Yunus, Kepala SMP Takhasus Qur'an Saddamiyyah Bangsri, *wawancara pre – research*, tanggal 30 Oktober 2019

¹⁹ Mulyono, Mantan Kepala SMP Walisongo Pecangaan dan guru PAI, *wawancara* tanggal 30 Oktober 2019

memiliki kompetensi pedagogik yang baik serta kesiapan mental dan *mindset* mengimplementasikan kurikulum 2013 sesuai dengan harapan.

Faktor utama lain yang menarik perhatian penulis untuk mengambil judul dalam penelitian ini adalah bahwa meskipun SMP Berbasis Pesantren, tetapi dari segi pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan oleh kemendikbud dan kemenag dalam program pembinaan lebih cenderung kepada guru-guru mapel umum seperti mapel Ujian Nasional, IPS, dan PPKn. Hal ini dikarenakan adanya asumsi bahwa guru mapel umum di pesantren lebih membutuhkan sosialisasi dan pengembangan kompetensi dibanding guru Agama. Guru agama dianggap mumpuni dalam hal materi dan kurikulum peantren dan keagamaa. Akan tetapi pada dasarnya pelatihan dan pengembangan kompetensi seharusnya diberlakukan serta menyentuh kepada semua guru mata pelajaran baik umum maupun agama.

Meskipun dalam hal penguasaan materi guru agama mungkin bisa dikatakan sangat mumpuni dilihat dari latar belakang pendidikannya di pesantren, namun berbeda halnya dalam kompetensi pedagogiknya. Kedalaman dan keluasan ilmu pengetahuan seseorang tidak selalu menjamin untuk mampu melaksanakan pembelajaran yang efektif. Terlebih dalam persoalan perubahan dan pengembangan kurikulum baru dengan aturan dan proses pembelajaran yang baru pula tentu sangat diperlukan adanya sosialisasi dan pelatihan yang secara teknis sebagai penunjang keberhasilan implementasi kurikulum tersebut.

Untuk dapat mendeskripsikan fakta dan fenomena implementasi kurikulum 2013 pada SMP Berbasis Pesantren di Jepara perlu diketahui mengenai faktor pendukung dan penghambat keberhasilannya. Adapun yang pertama adalah mengetahui dan mengidentifikasi kompetensi guru khususnya kompetensi pedagogik serta kesiapan semua komponen sekolah untuk melaksanakan perubahan kurikulum yang baru pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Berbasis pesantren di

Jejara perlu adanya penelitian. Bagaimana dan seperti apa gambaran kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam implementasi/penerapan kurikulum 2013 pada SMP Berbasis Pesantren di Jepara. Bertolak dari pemikiran tersebut penulis berasumsi perlunya dilaksanakan penelitian yang fokus utamanya pada kompetensi pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam dalam implementasi kurikulum 2013 pada SMP Berbasis Pesantren di Jepara Tahun Pelajaran 2019/2020.

B. Fokus Penelitian

Agar dapat memberikan pemahaman kepada pembaca serta menghindari terjadinya salah tafsir pada penelitian ini, maka perlu kiranya penulis uraikan fokus penelitian yang penulis lakukan. Adapun fokus dalam penelitian penulis ini adalah kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam berdasarkan kriteria yang dirumuskan dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, dan Peraturan Menteri Agama (Permenag) nomor 16 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan Agama pada sekolah.

Kompetensi pedagogik tersebut adalah kemampuan yang dimiliki oleh guru PAI dalam mengelola proses belajar mengajar (PBM) PAI di dalam kelas yang terdiri atas; kemampuan memahami karakteristik peserta didik, perencanaan langkah-langkah dalam proses belajar mengajar (menyusun RPP dan perangkat pembelajaran), melaksanakan pembelajaran, penilaian dan evaluasi, tindak lanjut hasil evaluasi, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, tindakan refleksi pembelajaran serta kemampuan dalam hal mengaktualisasikan segenap potensi yang ada pada diri peserta didik dalam framework implementasi kurikulum 2013 pada SMP Berbasis Pesantren di Jepara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah penulis kemukakan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kompetensi pedagogik guru PAI di SMP Berbasis Pesantren Jepara?
2. Bagaimanakah implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran PAI pada SMP Berbasis Pesantren di Jepara?
3. Bagaimanakah urgensi kompetensi pedagogik guru PAI dalam implementasi kurikulum 2013 pada SMP Berbasis Pesantren di Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam di SMP Berbasis Pesantren Jepara.
2. Mengetahui dan menganalisis implementasi/penerapan kurikulum 2013 pada pembelajaran PAI di SMP Berbasis Pesantren Jepara
3. Menegaskan pentingnya kompetensi pedagogik guru sebagai salah satu faktor utama keberhasilan implementasi kurikulum 2013 pada SMP Berbasis Pesantren di Jepara khususnya dan sekolah pada umumnya.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi yaitu; secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana dalam mengembangkan pemahaman maupun kompetensi pedagogik guru, terutama guru PAI.

- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan analisis dan evaluasi terkait implementasi dan pengembangan kurikulum 2013 di SMP umum terutama pada SMP Berbasis Pesantren.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Dinas Pendidikan dan Sekolah

Dapat memberikan informasi mengenai kompetensi pedagogik guru PAI khususnya, dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 pada pembelajaran PAI. Sebagai tindak lanjut harapannya menjadi pertimbangan dalam menentukan serta menetapkan kebijakan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan maupun kondisi sekolah masing-masing.
 - b. Bagi Pendidik / Guru

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Menjadi motivasi untuk selalu meningkatkan kompetensi yang menjadi konsekuensi logis dari profesionalisme guru. Merujuk pada amanat Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen bahwa seorang guru harus menguasai 4 kompetensi di antaranya adalah kompetensi pedagogik. Disamping menjadi kewajiban dinas terkait untuk peningkatan kompetensi guru juga menjadi tanggungjawab dari setiap guru untuk mengembangkan kompetensinya.
 - c. Manfaat bagi peneliti

Hasil dari sebuah penelitian memerlukan pengembangan agar informasi yang diperoleh juga dapat memberikan sumbangsih pengembangan pengembangan. Begitu juga halnya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih informasi yang signifikan mengenai kompetensi pedagogik guru PAI dalam implementasi kurikulum 2013 pada SMP Berbasis pesantren khususnya dan sekolah pada umumnya.

Berdasarkan hasil informasi dari penelitian ini dapat dijadikan acuan dasar pertimbangan penelitian berikutnya tentang kompetensi pedagogik guru serta implementasi dan pengembangan kurikulum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah ataupun memperjelas pemahaman isi dan pembahasan dalam tesis ini perlu kiranya penulis deskripsikan sistematika alur penulisan tesis ini. Secara global tesis ini terbagi atas tiga bagian utama yaitu; bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

1. Bagian Awal atau Muka Tesis

Dalam bagian ini terdiri atas:

- a. Halaman Sampul (*Cover*)
- b. Halaman Judul
- c. Halaman Pengesahan
- d. Halaman Pernyataan Keaslian
- e. Halaman Nota Persetujuan Pembimbing
- f. Motto
- g. Persembahan
- h. Pedoman Transliterasi
- i. Daftar Isi
- j. Kata Pengantar
- k. Abstrak
- l. Daftar Lampiran.

2. Bagian Isi

Bagian isi adalah bagian utama tesis yang terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORI

BAB III METODE PENELITIAN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V PENUTUP

3. Bagian Akhir

Dalam bagian akhir ini terdiri atas:

- a. Daftar Pustaka
- b. Daftar Lampiran
- c. Daftar Riwayat Hidup